

BAB I

PENDAHULUAN

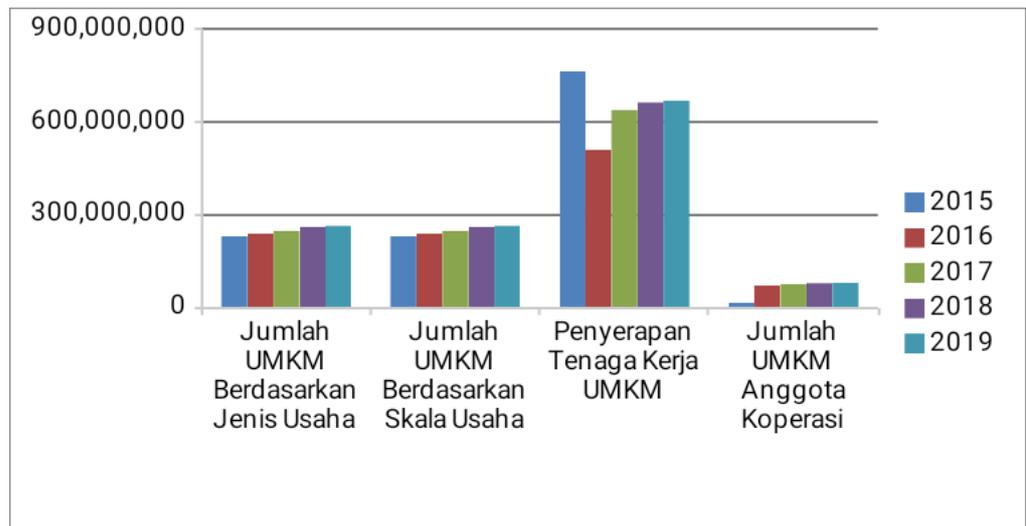
A. Latar Belakang

Menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 yaitu Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai Usaha Mikro. Sedangkan Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Dan Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih dari hasil penjualan tahunan.

Usaha mikro kecil dan menengah atau yang dikenal dengan UMKM adalah salah satu jenis usaha yang mampu memberikan peran yang nyata pada sektor perekonomian. Perkembangan

jumlah UMKM dari tahun ke tahun semakin bertambah dan perkembangan baru terlihat dari sisi jumlahnya dengan berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM DIY, 95% perekonomian DIY disumbang oleh UMKM, sebuah angka yang cukup besar. Usaha mikro pada 55%, kecil 25%, dan menengah 15%, sedangkan besar sampai mencapai pada 5%. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM DIY, untuk tahun 2015 jumlah UMKM di DIY mencapai angka 230.047. Jumlah ini naik jika dibandingkan pada tahun lalu yang tercatat hingga 220.703 UMKM sehingga naik hampir 10.000. Pada akses permodalan merupakan salah satu bentuk masalah yang dekat dengan UMKM di DIY. Dalam aspek *financial* hanya mempunyai sedikit UMKM yang mengalami perkembangan dalam hal kinerja keuangannya. Hal ini tidak terlepas dari kesadaran pelaku UMKM pada pentingnya dalam pengelolaan keuangan usaha yang dijalankannya.

(<http://jogja.tribunnews.com/2016/06/22/lipus-95-persen-perekonomian-diy-disumbang-oleh-umkm>)



Sumber: Aplikasi Dataku Daerah Istimewa Yogyakarta

Gambar 1.1

DATA UMKM DIY 2019

Jika dilihat dari perkembangan UMKM yang ada di BPRS Barokah Dana Sejahtera untuk persentase pada kantor pusat 40%, cabang Sleman 40% sedangkan untuk cabang kulonprogo belum dapat dianalisis karena masih dalam 3 bulan peresmian. Ini menunjukkan bahwa antara kantor pusat dan cabang sama-sama menunjukkan persentase yang seimbang dalam memajukan usaha mikro kecil di BPRS Barokah Dana Sejahtera. UMKM diwajibkan untuk melakukan pencatatan laporan keuangan dengan baik. Pencatatan laporan keuangan adalah aspek yang paling penting dalam suatu kegiatan usaha. Laporan keuangan dipakai sebagai informasi keuangan yang digunakan dengan baik bagi para pihak

dalam maupun luar kegiatan usaha dalam pencatatan laporan keuangan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia. Jika melihat dari tingkat pengetahuan pelaku UMKM yang masih belum mampu dalam mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia sehingga diciptakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) dalam mempermudah pelaporan keuangan UMKM.

Ada beberapa masalah yang dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah seperti keterbatasan modal kerja, modal investasi, keterbatasan teknologi, kesulitan utama dalam mendapatkan bahan baku dengan kualitas baik dan harga yang terjangkau, sumber daya manusia dengan kualitas baik manajemen dan teknik produksi, serta kesulitan dalam pemasaran. Sesuai dengan usaha yang dikembangkan oleh UMKM hanya dengan sebatas tingkat modal yang dimilikinya. Oleh sebab itu, UMKM sendiri juga mengalami kesulitan untuk mencari informasi atas modal yang dimiliki oleh nasabah, persyaratan yang sulit kepada pihak pemberi kredit sangatlah memberatkan pada para pelaku UMKM (Osa, 2010 pada Rudiantoro dan Siregar, 2011).

Pemerintah Indonesia melalui PP No 17 Tahun 2013 menjelaskan bahwa adanya kewajiban bagi pelaku usaha kecil untuk melakukan pencatatan akuntansi (Tuti dan Dwijayanti, 2014). Tetapi dalam pelaksanaan pembukuan merupakan salah satu hal

yang sulit bagi pemilik UMKM dikarenakan memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai akuntansi, seperti rumitnya dalam proses akuntansi, dan menganggap bahwa laporan keuangan bukanlah hal yang begitu penting bagi UMKM (Said, 2009). Persepsi menjadi titik awal bagi seseorang dalam menilai dan menjalankan suatu hal, termasuk dalam pembukuan dan pelaporan keuangan. Dengan memandang bahwa pembukuan dan pelaporan merupakan hal yang penting bagi berkembangnya usaha, maka akan mendorong mereka untuk memulai dalam melakukan pembukuan atau bagi yang sudah memulai dapat lebih lagi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Informasi akuntansi seperti halnya pencatatan keuangan merupakan suatu modal awal bagi pelaku UMKM yang berguna untuk mengambil keputusan dalam mengelola usahanya. Beberapa UMKM yang ada juga belum menerapkan pencatatan akuntansi secara disiplin dengan pembukuan yang teratur, kebanyakan dari pelaku UMKM sendiri berfikir bahwa informasi akuntansi tidaklah begitu penting dikarenakan susah dalam penerapannya dan juga membuang waktu serta biaya. Menurut (Myer dalam Munawir, 2007) mengatakan bahwa laporan keuangan adalah dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Laporan keuangan menjadi penting karena dapat memberikan input (informasi) yang bisa dipakai dalam pengambilan keputusan. Kedua daftar itu adalah

daftar neraca keuangan dan daftar pendapatan atau daftar rugi laba. Menurut (Mulyawan, 2015). Laporan keuangan merupakan alat penguji dari pekerjaan bagian pembukuan yang digunakan untuk menentukan dan menilai posisi keuangan perusahaan.

Jika dilihat dari prospek perkembangan lembaga keuangan mikro syariah BPRS dalam sumber pendanaan bagi UMKM mempunyai pengaruh yang cukup besar dimana Bank syariah telah melakukan kerjasama dalam menyalurkan pembiayaan UMKM melalui lembaga keuangan syariah yang lebih kecil, seperti BPRS. Dalam pengajuan modal ke BPRS Barokah Dana Sejahtera mempunyai persyaratan dalam mengajukan modal yaitu jika nasabah tergolong kedalam kategori nasabah lama dan sudah melakukan operasional usahanya selama minimal 1 tahun kemudian sudah masuk dalam daftar pengajuan modal UMKM di BPRS Barokah Dana Sejahtera, maka akan mudah untuk diproses (Anis, 2019).

Penelitian ini dilakukan di BPRS Barokah Dana Sejahtera yang berlokasi di Jalan Sisingamangaraja No. 71, Brontokusuman, Mergangsan, Ngupasan, Gondomangan, Kota Yogyakarta. BPRS Barokah Dana Sejahtera atau biasa dikenal dengan BDS berdiri pada tahun 2007 di Brontokusuman Mergangsan Yogyakarta. Sudah lebih dari 12 tahun menjalankan aktivitasnya dalam perbankan Syariah yang diawali dengan keuntungan diawal tahun

berdirinya, yang menjadikan Barokah Dana Sejahtera sebagai BPRS terpandang di Yogyakarta. BPRS Barokah Dana Sejahtera meresmikan kantor cabang baru di Sleman sebagai lokasi pembukaan kantor cabang, ini dikarenakan mempunyai potensi perekonomian yang terus berkembang dan Sleman juga memiliki tingkat perekonomian tertinggi kedua di Yogyakarta. BPRS Barokah Dana Sejahtera sengaja untuk memilih Sleman sebagai kantor cabang dengan harapan, Barokah Dana Sejahtera mampu dalam memberikan kontribusi yang positif bagi perekonomian dalam sektor UMKM Sleman (Anis, 2019).

Berdasarkan pada kondisi diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian agar dapat mengkaji mengenai cara bagaimana pihak perbankan mengetahui laporan keuangan para pelaku usaha UMKM dan melakukan pencatatan pelaporan keuangan UMKM. Melihat hubungan tersebut maka mendasari untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul **“PENCATATAN INFORMASI KEUANGAN PADA UMKM TERKAIT AKSES MODAL DI BPRS BAROKAH DANA SEJAHTERA CABANG SLEMAN”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana BPRS Barokah Dana Sejahtera dapat mengetahui informasi keuangan UMKM terkait akses modal?
2. Bagaimana pencatatan pelaporan keuangan UMKM?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui BPRS Barokah Dana Sejahtera informasi keuangan UMKM terkait akses modal.
2. Untuk mengetahui pencatatan pelaporan keuangan UMKM.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan peran terhadap pengembangan pencatatan informasi keuangan pada UMKM terkait akses modal di BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta.
 - b. Mengetahui gambaran secara umum isi informasi keuangan pada UMKM.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan pada penerapan teori pada kasus

nyata mengenai pencatatan informasi keuangan pada UMKM terkait akses modal di BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta.

b. Bagi Lembaga Keuangan Mikro BPRS Barokah Dana Sejahtera

Memberikan informasi bagi pihak pengelola lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan usaha dan kualitas kinerjanya dalam memasarkan BPRS Barokah Dana Sejahtera pada masyarakat dan juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan.

c. Bagi Pedagang Kecil

Memperlancar usahanya, mencari solusi pada hambatan yang dihadapi pedagang kecil dalam mengambil keputusan dalam memperoleh tambahan modal.

d. Bagi Pembaca

Menambah wawasan dalam dunia bisnis dan masyarakat luas untuk bisa mengetahui adanya sesuatu lembaga keuangan syariah yang dapat melayani nasabah khususnya para pedagang kecil yang membutuhkan modal dan sebagai landasan dalam keperluan penelitian.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian penulis memberikan pembahasan agar dapat memudahkan penelitian dan pembaca untuk memahami secara keseluruhan bahasa dalam penelitian ini. Oleh karena itu, sistematika pembahasan penelitian antara lain, sebagai berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN

BAB ini merupakan pembahasan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta sistematika pembahasan.

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Pada BAB ini membahas mengenai tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori yang relevan dan saling berkaitan dengan tema skripsi berupa jurnal dan buku.

3. BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan wawancara, dokumentasi dan observasi.

4. BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistematika penyajian hasil dari penelitian disusun berdasarkan dengan 3 BAB bagian dalam peran pada BPRS Barokah Dana Sejahtera terhadap Kualitas Informasi Keuangan pada UMKM

Terkait akses Modal di BPRS Barokah Dana Sejahtera
Yogyakarta cabang Sleman.

5. BAB V : PENUTUP

BAB terakhir berisi kesimpulan, saran-saran, dan rekomendasi
dari penulis.